

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 6.01.0.00.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
6	01	01			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											18,396,106,237
6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											19,451,000
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %		15,010,000		
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %		4,441,000		
6	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											14,858,015,660
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	110 orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %		14,711,925,660		
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	8 orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %		141,510,000		
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %		4,580,000		
6	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											64,429,850
6	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah BMD yang diasuransikan	9 unit/set	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		54,900,000		
6	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan hononya	1 dokumen 3 orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		6,544,250		
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		2,985,600		
6	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,098,332,000
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jumlah ASN dan n/Ono ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	610 orang 120 orang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		1,063,360,000		
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah asn yang mengikuti sosialisasi jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	48 orang 8 kali	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		19,560,000		
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah bintek yang dilaksanakan	20 kali	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		15,412,000		
6	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											736,339,027
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	117 unit/set	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		6,481,800		
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit/set	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		22,249,400		
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2790 unit/set	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		98,325,180		
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	40 kali	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		37,092,647		
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	246 unit/set	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		32,640,000		
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	81 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		539,550,000		
6	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											242,159,400
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah mebel	14 unit/set	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		15,916,000		
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	41 unit/set	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		226,243,400		
6	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,037,244,591
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		24,365,000		
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 mbps 2 rekening 1740 meter kubik 144000 KVA	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		401,642,400		
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (spanduk)	5 unit	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		4,500,000		
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah tenaga pelayanan umum	79 orang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		606,737,191		
6	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											340,134,709
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %		11,800,000		
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	9 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %		73,173,500		
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	33 unit/set	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %		43,750,000		

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak KUA-PPAS

6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah gedung kantor Inspektorat yang dipelihara/rehab	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %		187,251,209
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	2 uni	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %		24,160,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							2,283,045,514	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2,030,676,414	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah	778 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		1,087,081,533
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	307 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		216,946,000
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah laporan kinerja yang direviu	52 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		11,820,500
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah laporan keuangan yang direviu	52 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		21,128,100
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	8 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		309,463,650
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah hasil pengawasan internal	15 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		5,351,800
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	3 laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		378,884,831
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							252,369,100	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	persentase penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang diproses/ditindaklanjuti	60 %	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	80 %		40,335,000
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	80 %		212,034,100
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							619,043,836	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							294,835,686	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	Jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	5 dokumen	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan	100 %		8,245,400
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	Jumlah kegiatan teknis yang ditetapkan	1 dokumen	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan	100 %		286,590,286
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi							324,208,150	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 laporan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %		80,070,950
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	Jumlah Laporan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 laporan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %		58,974,000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	jumlah laporan penegakan integritas	1 laporan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %		134,988,200
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	Jumlah laporan kegiatan penegakan integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 laporan 0 Perangkat Daerah	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %		50,175,000
TOTAL												21,298,195,587	